

F. Huk

50/91



Laporan Penelitian

Biaya OPF Universitas Andalas
Kontrak No. B83a/XIV/A/Unand - 1991

**SIMPANAN BAJAPUIK
DI KECAMATAN 2 X 11 6 LINGKUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Darmilis, SH.MH. (Pembimbing)
Restam Ismael, SH. (Ketua)
Firmansyah, SH. (Anggota)
Dahlil Marjon, SH. (Anggota)
Afrizal, SH. (Anggota)
Tasman, SH. (Anggota)

X S
AAN
ALAS
77

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Judul Penelitian : Pelaksanaan Simpanan Bajapuik di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

B. Ruang Lingkup / Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup antara lain :

1. Cara-cara simpanan bajapuik dilaksanakan oleh anggota KUD;
2. Hak dan Kewajiban anggota simpanan bajapuik.
3. Cara mengambil simpanan bajapuik;
4. Anggota-anggota pelaksana untuk mengambil simpanan bajapuik.

Disiplin ilmu yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat interdisiplin. Aspek-aspek yang ditinjau dan dikaji dari penelitian ini adalah dari sudut ilmu hukum, ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi pedesaan.

C. Latar Belakang dan Permasalahan.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga

ekonomi rakyat yang mandiri yang berakar di dalam masyarakat. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat luas untuk berkoperasi, antara lain melalui pendidikan, penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi. (GBHN / Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1988).

Pembinaan koperasi Unit Desa dan Koperasi Primer lainnya, perlu dilanjutkan sehingga semakin meningkat mutu dan kemampuannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Sejalan dengan itu perlu dilanjutkan pula peningkatan kemampuan dan peranan koperasi fungsional seperti karyawan perusahaan, pegawai negeri, wanita, pelajar dan mahasiswa agar tumbuh makin kuat dan mandiri.

Dengan adanya UU No. 12 Tahun 1967 yang dikenal dengan nama UU Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 maka Koperasi Indonesia memperoleh kedudukan hukum dan mendapat tempat yang wajar sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Koperasi yang bersama-sama dengan sektor ekonomi negara dan swasta bergerak di segala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III

PENEMUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung.

Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung termasuk dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, letak daerah Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung terletak antara 0° - 39° Lintang Selatan dan 100° - 20° Bujur Timur, di mana luas wilayahnya 315,75 ha serta jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 1990 berjumlah 56.116 jiwa.

Batas-batas Kecamatan sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Nan Sabaris serta sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tujuh Koto, sebelah Timur juga dengan Kabupaten Tanah Datar.

Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung sebelum dibagi-bagi berdasarkan pemerintahan desa terdiri atas 10 Kenagarian yaitu :

- a. Kenagarian Buguk;
- b. Kenagarian Kayu Tanam;
- c. Kenagarian Anduring;
- d. Kenagarian Sicincin;
- e. Kenagarian Pakanbaru;

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap simpanan bajapuik ini ada beberapa hal antara lain :

1. Ada kurang hasratnya anggota/masyarakat dalam melakukan penabungan atau untuk menabung yang disebabkan ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal disebabkan karena telah banyaknya lembaga-lembaga yang mengadakan simpanan bagi anggota-anggota masyarakat baik melalui Bank-bank maupun BPR yang ada, sedangkan dalam faktor internal di mana terdapatnya dalam simpanan bajapuik yang mana pengurus banyak yang melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap simpanan yang telah dilakukan atau diberikan oleh anggota sehingga ini berdampak bahwa si penabung menjadi kurang berminat atau bergairah jadinya, faktor internal ini disebabkan juga bertambahnya kebutuhan masyarakat sedangkan penghasilan tidak seimbang dengan bertambahnya yang kebutuhan yang ada, sehingga keinginan untuk menabung menjadi berkurang.
2. Kurang aktifnya para pengurus KUD untuk membangkitkan semangat masyarakat tentang simpanan bajapuik ini,

DAFTAR BACAAN

1. R. Sukardono, SH., Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Bagian ke dua, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1962.
2. Dra. Ninik Widiyanti dan J.W. Sumanthia, SH., Koperasi dan perkeekonomian Indonesia, Dina Aksara Jakarta, 1988.
3. Prof. Dr. Hans Munkner, Terjemahan Abdulkadir Muhammad, SH., Hukum Koperasi, Alumni Bandung, 1987.
4. Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Jakarta, 1977.
5. Muhammad Hatta, Pengantar Sosiologi Ekonomi, Djambatan Jakarta, 1967.

----- oOo -----